1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

    1. Perkembangan Inflasi Daerah
    2. Inflasi Triwulan III

    Perkembangan inflasi di Provinsi Kalimantan Timur pada Triwulan III Tahun 2026 menunjukkan adanya peningkatan tekanan inflasi dibandingkan dengan akhir Triwulan II, meskipun inflasi bulanan masih relatif terkendali. Setelah berada pada level 3,20 persen (y-on-y) pada Juni 2026, inflasi meningkat menjadi 3,31 persen pada Juli, 3,83 persen pada Agustus, dan 3,98 persen pada September 2026.

    Secara bulanan, inflasi tercatat sebesar 0,18 persen pada Juli, 0,10 persen pada Agustus, dan kembali meningkat sebesar 0,18 persen pada September. Secara kumulatif, inflasi tahun kalender meningkat dari 2,36 persen pada Juni menjadi 2,82 persen pada September 2026.

    Dengan demikian, perkembangan inflasi selama Triwulan III menunjukkan bahwa tekanan harga secara tahunan semakin meningkat, tetapi kenaikan harga secara bulanan masih relatif moderat. Kondisi ini perlu mendapat perhatian karena peningkatan inflasi tahunan terutama mulai terlihat pada kelompok makanan, minuman dan tembakau, sementara kelompok transportasi masih menjadi salah satu penyumbang terbesar inflasi tahunan.

    Berikut perkembangan laju inflasi selama triwulan III 2026 :

Laju Inflasi (%)	**Juli**	**Agustus**	**September**
Bulanan (mtm)	0,18%	0,10%	0,18%
Tahun Kalender (ytd)	2,54%	2,64%	2,82%
Tahunan (yoy)	3,31%	3,83%	3,98%

    Pada Juli 2026, inflasi tahunan Kalimantan Timur sebesar 3,31 persen, dengan inflasi bulanan sebesar 0,18 persen dan inflasi tahun kalender sebesar 2,54 persen. Inflasi tertinggi secara spasial terjadi di Kota Samarinda sebesar 3,77 persen, sedangkan terendah di Kabupaten Pada Agustus 2026, tekanan inflasi meningkat menjadi 3,83 persen (yoy). Inflasi bulanan tercatat sebesar 0,10 persen dan inflasi tahun kalender sebesar 2,64 persen. Secara spasial, inflasi tertinggi terjadi di Kota Samarinda sebesar 4,03 persen, sedangkan terendah di Kabupaten Berau sebesar 3,31 persenPenajam Paser Utara sebesar 2,34 persen.

    Pada September 2026, inflasi Provinsi Kalimantan Timur sebesar 3,98 persen (y-on-y) dengan IHK sebesar 112,90. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar 4,18 persen, sedangkan inflasi terendah terjadi di Kota Balikpapan sebesar 3,93 persen. Secara bulanan, inflasi September tercatat sebesar 0,18 persen dan secara tahun kalender sebesar 2,82 persen.

    Perkembangan tersebut menunjukkan adanya perubahan sumber tekanan inflasi dibandingkan dengan Triwulan II. Pada Triwulan II, tekanan inflasi lebih banyak dipengaruhi oleh kelompok transportasi dan administered prices, sedangkan pada Triwulan III tekanan pada kelompok pangan kembali menguat. Kondisi ini perlu menjadi perhatian karena volatilitas komoditas pangan relatif tinggi dan dapat meningkat lebih cepat apabila terjadi gangguan pasokan maupun distribusi.

2. Perkembangan Inflasi BulanJuli 2026

Pada Juli 2026, Provinsi Kalimantan Timur mengalami inflasi sebesar 0,18 persen (mtm), 2,54 persen (ytd), dan 3,31 persen (yoy). Secara tahunan, kelompok transportasi menjadi salah satu sumber tekanan terbesar dengan inflasi sebesar 9,83 persen, dan memberikan andil sebesar 1,28 persen terhadap inflasi y-on-y. Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya juga mengalami inflasi sebesar 10,16 persen dengan andil 0,69 persen. Sementara kelompok makanan, minuman dan tembakau mengalami inflasi sebesar 2,77 persen dengan andil sebesar 0,83 persen.

Data BPS menunjukkan bahwa kelompok makanan, minuman dan tembakau secara bulanan justru mengalami deflasi sebesar 0,12 persen pada Juli, terutama akibat penurunan harga cabai rawit, bawang merah dan tomat.

Berdasarkan komoditasnya, tekanan inflasi Provinsi Kaltim periode Juli 2026 tertuang dalam tabel berikut :

	Komoditas Inflasi		Komoditas Inflasi
	pemeliharaan/*service*		emas perhiasan
	lemari pakaian		angkutan Udaara
	solar		beras
	angkutan udara		sigaret kretek mesin (SKM)
Komoditas Andil mtm	pelumas/oli mesin	**Komoditas Andil yoy**	ikan layang/ikan benggol
	Komoditas Deflasi		**Komoditas Deflasi**
	daging ayam ras		tas sekolah
	cabai rawit		makanan hewan pemeliharaan
	emas perhiasan		
	ikan layang/ikan benggol		
	kacang panjang		

Sumber : BPS Kaltim

3. Perkembangan Inflasi Bulan Agustus2026

Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Timur mengalami inflasi sebesar 0,10 persen (mtm), 2,64 persen (ytd), dan 3,83 persen (yoy). Inflasi tahunan tersebut lebih tinggi dibandingkan Juli 2026 yang sebesar 3,31 persen.

Kelompok transportasi masih menjadi penyumbang terbesar dengan inflasi sebesar 10,55 persen dan memberikan andil sebesar 1,35 persen. Kelompok makanan, minuman dan tembakau mengalami inflasi sebesar 4,06 persen dengan andil sebesar 1,22 persen, sedangkan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami inflasi sebesar 9,96 persen dengan andil sebesar 0,69 persen.

Peningkatan inflasi tahunan pada Agustus menunjukkan bahwa tekanan harga mulai lebih luas. Kelompok pangan mulai memberikan kontribusi yang semakin besar, sementara transportasi tetap menjadi sumber tekanan struktural. Secara bulanan, tekanan inflasi masih relatif rendah, sehingga kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan inflasi tahunan

belum mencerminkan lonjakan harga yang terjadi secara serentak pada seluruh komoditas.

Berdasarkan komoditasnya, tekanan inflasi Provinsi Kaltim periode Agustus 2026 tertuang dalam tabel berikut :

Komoditas Andil mtm	**Komoditas Inflasi**	**Komoditas Andil yoy**	**Komoditas Inflasi**
	Angkutan udara		Emas perhiasan
	Solar		Angkutan udara
	Sewa rumah		Beras
	Pelumas/Oli mesin		Sigaret kretek mesin
	Sate		Ikan layang/ikan benggol
	Komoditas Deflasi		**Komoditas Deflasi**
	Daging ayam ras		Tas sekolah
	Emas perhiasan		Baju muslim pria
	Ikan layang/ikan benggol		Baju muslim wanita.
	Bawang merah		

4. Perkembangan Inflasi Bulan September2026

Pada September 2026, Provinsi Kalimantan Timur mengalami inflasi sebesar 0,18 persen (mtm), 2,82 persen (ytd), dan 3,98 persen (yoy). Inflasi yoy tersebut lebih tinggi dibandingkan Agustus yang sebesar 3,83 persen.

Berdasarkan kelompok pengeluaran, kelompok makanan, minuman dan tembakau mengalami inflasi yoy sebesar 5,09 persen dan memberikan andil terbesar terhadap inflasi sebesar 1,53 persen. Kelompok transportasi mengalami inflasi sebesar 9,41 persen dengan andil 1,21 persen, sedangkan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami inflasi sebesar 8,60 persen dengan andil 0,60 persen.

Secara mtm, kelompok makanan, minuman dan tembakau memberikan andil inflasi sebesar 0,24 persen, sementara kelompok transportasi justru memberikan andil deflasi sebesar 0,04 persen. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan inflasi September terutama berasal dari kelompok pangan, sedangkan transportasi masih menjadi sumber tekanan secara tahunan meskipun secara bulanan mengalami penurunan.

Berdasarkan komoditasnya, tekanan inflasi Provinsi Kaltim periode Septemnber 2026 tertuang dalam tabel berikut :

Komoditas Andil mtm	**Komoditas Inflasi**	**Komoditas Andil yoy**	**Komoditas Inflasi**
	Daging ayam ras		Bensin
	Minyak goreng		Emas perhiasan
	Beras		Angkutan udara
	Jagung manis		Cabai rawit
	Bayam		Daging ayam ras
	Komoditas Deflasi		**Komoditas Deflasi**
	Ikan layang/ikan benggol		Bawang merah
	Angkutan udara		Ikan gabus
	Ikan tongkol/ikan ambu-ambu,		Parfum
	Bahan bakar rumah tangga		Tahu mentah
	Daging ayam ras		Tarif kendaraan roda dua online

Perbandingan Perkembangan Inflasi Triwulan IIdan Triwulan III Tahun 2026

Secara umum, perkembangan inflasi Provinsi Kalimantan Timur pada Triwulan III Tahun 2026 menunjukkan peningkatan tekanan dibandingkan Triwulan II. Pada Triwulan II, inflasi tahunan meningkat dari 2,50 persen pada April menjadi 3,04 persen pada Mei dan 3,20 persen pada Juni. Sementara pada Triwulan III, inflasi kembali meningkat dari 3,31 persen pada Juli menjadi 3,83 persen pada Agustus dan 3,98 persen pada September. Dengan demikian, inflasi y-on-y meningkat sebesar 0,78 poin persentase dari Juni 2026 sebesar 3,20 persen menjadi September 2026 sebesar 3,98 persen.

Perubahan sumber tekanan juga cukup terlihat. Pada Triwulan II, tekanan lebih banyak berasal dari transportasi dan administered prices, sementara pada Triwulan III tekanan kelompok pangan kembali menguat. Pada September, kelompok makanan, minuman dan tembakau memberikan andil sebesar 1,53 persen, lebih besar dibandingkan kelompok transportasi sebesar 1,21 persen.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengendalian inflasi ke depan perlu semakin diarahkan pada penguatan sisi pasokan pangan, di samping tetap menjaga stabilitas transportasi, energi dan distribusi.

Sebagai perbandingan historis, inflasi yoy September 2026 sebesar 3,98 persen lebih tinggi dibandingkan September 2025 sebesar 1,77 persen dan September 2024 sebesar 2,16 persen. Inflasi ytd September 2026 sebesar 2,82 persen juga lebih tinggi dibandingkan September 2025 sebesar 1,54 persen dan September 2024 sebesar 1,24 persen

1. Risiko Inflasi Triwulan IV2026

Memasuki Triwulan IV Tahun 2026, tekanan inflasi perlu mendapat perhatian lebih besar karena terdapat kombinasi antara risiko pasokan pangan, kondisi iklim, peningkatan mobilitas dan permintaan masyarakat, biaya distribusi, serta tekanan transportasi dan energi.

Faktor-Faktor Risiko Utama Inflasi Triwulan IV 2026 :

1. Risiko Fenomena El Ninoterhadap Produksi dan Pasokan Pangan

Salah satu risiko utama inflasi pada Triwulan IV Tahun 2026 adalah fenomena El Nino dengan intensitas sangat kuat. Kondisi El Nino dapat menyebabkan penurunan curah hujan dan memperpanjang periode kering di sejumlah wilayah. Berkurangnya curah hujan berpotensi menurunkan ketersediaan air bagi kegiatan pertanian, baik untuk tanaman pangan maupun hortikultura. Kondisi tersebut selanjutnya dapat mengganggu produktivitas tanaman dan meningkatkan risiko penurunan hasil panen.

Apabila produksi pangan mengalami penurunan, ketersediaan komoditas di pasar dapat ikut berkurang. Kondisi ini menjadi semakin berisiko bagi Kalimantan Timur yang masih memiliki ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar daerah. Gangguan produksi di daerah pemasok dapat mengurangi volume pasokan yang masuk ke Kalimantan Timur dan pada akhirnya mendorong kenaikan harga, khususnya pada komoditas yang memiliki tingkat

5.

volatilitas tinggi seperti cabai, sayuran, dan komoditas hortikultura lainnya.

Oleh karena itu, perkembangan kondisi El Nino perlu menjadi salah satu indikator dalam pemantauan risiko inflasi, terutama melalui pemantauan kondisi produksi, ketersediaan stok, perkembangan harga komoditas pangan, serta kondisi daerah pemasok. Langkah antisipasi perlu dilakukan sebelum gangguan pasokan berdampak lebih lanjut terhadap harga pangan di tingkat konsumen.

2. Risiko Gangguan Pasokan Komoditas Pangan Strategis

Struktur perekonomian Kalimantan Timur masih sangat bergantung pada pasokan bahan pangan dari Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan beberapa daerah sentra produksi lainnya. Apabila terjadi gangguan cuaca, keterlambatan pelayaran, kenaikan ongkos angkut, maupun hambatan distribusi darat, maka harga komoditas strategis seperti beras, cabai, bawang merah, telur ayam ras, daging ayam ras, dan minyak goreng berpotensi mengalami peningkatan.

Risiko ini relatif lebih tinggi pada kabupaten/kota dengan akses logistik terbatas, seperti Mahakam Ulu, Kutai Barat, Berau, dan wilayah pedalaman lainnya yang memerlukan waktu distribusi lebih panjang.

3. Risiko Peningkatan Permintaan Menjelang Natal dan Tahun Baru

Memasuki akhir tahun, aktivitas masyarakat diperkirakan meningkat seiring periode Natal dan Tahun Baru. Peningkatan mobilitas masyarakat berpotensi meningkatkan permintaan terhadap pangan, jasa transportasi, akomodasi, restoran serta berbagai kebutuhan konsumsi rumah tangga.

Risiko terutama terdapat pada:

- angkutan udara dan angkutan antar kota;
- bahan pangan strategis;
- makanan dan minuman;
- jasa akomodasi dan restoran;
- bahan bakar;
- kebutuhan rumah tangga.

Data Triwulan III menunjukkan bahwa kelompok transportasi masih memiliki inflasi tahunan yang tinggi. Pada September 2026 kelompok transportasi mengalami inflasi yoy sebesar 9,41 persen dan memberikan andil sebesar 1,21 persen.

4. Risiko Kenaikan Harga Energi dan Biaya Logistik

Perkembangan harga minyak dunia masih menjadi salah satu faktor eksternal yang perlu diwaspadai. Potensi penyesuaian harga BBM nonsubsidi dan avtur dapat meningkatkan biaya

transportasi darat maupun udara yang pada akhirnya berdampak terhadap kenaikan biaya distribusi barang dan jasa di Kalimantan Timur.

Mengingat karakteristik wilayah yang bergantung pada transportasi laut dan udara untuk distribusi barang, kenaikan biaya logistik berpotensi memberikan dampak yang lebih besar dibandingkan provinsi lain.

5. Risiko Perbedaan Tekanan Inflasi Antarwilayah

Perbedaan karakteristik ekonomi antar kabupaten/kota menyebabkan tekanan inflasi tidak merata. Wilayah perkotaan seperti Samarinda dan Balikpapan cenderung lebih sensitif terhadap kenaikan harga jasa, transportasi, dan biaya hunian, sedangkan wilayah pedalaman lebih rentan terhadap gangguan pasokan dan distribusi pangan.

Oleh karena itu, strategi pengendalian inflasi perlu mempertimbangkan karakteristik masing-masing wilayah melalui penguatan kerja sama antar daerah, peningkatan kelancaran distribusi, serta optimalisasi pemantauan harga secara real time.

6. Peningkatan permintaan masyarakat (demand side pressure)

Kenaikan harga energi, meningkatnya biaya transportasi, maupun informasi mengenai potensi gangguan pasokan dapat memengaruhi ekspektasi inflasi masyarakat. Apabila tidak diimbangi dengan komunikasi publik yang efektif, kondisi tersebut berpotensi mendorong perilaku pembelian berlebihan (*panic buying*) yang dapat memperbesar tekanan harga di tingkat konsumen.

7. Keterbatasan ruang fiskal daerah

Efisiensi anggaran dapat membatasi kapasitas intervensi pemerintah daerah, namun dampaknya tidak langsung terhadap inflasi, melainkan pada efektivitas pengendalian.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Pengendalian inflasi di Provinsi Kalimantan Timur pada Triwulan III Tahun 2026 masih menghadapi sejumlah permasalahan, baik yang bersifat struktural maupun teknis operasional. Permasalahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan dinamika harga, tetapi juga mencerminkan keterbatasan sistem produksi, distribusi, serta kapasitas intervensi kebijakan di daerah.

1. Tingginya ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar daerah.

Sebagian besar komoditas pangan strategis, seperti beras, cabai, bawang, dan daging ayam, masih dipasok dari provinsi lain. Kondisi ini menyebabkan stabilitas harga di Kalimantan Timur sangat dipengaruhi oleh kondisi produksi dan distribusi di daerah pemasok. Ketika

terjadi gangguan pasokan, baik akibat cuaca maupun distribusi, dampaknya langsung dirasakan dalam bentuk kenaikan harga di daerah.

2. Keterbatasan infrastruktur dan tingginya biaya distribusi.

Kondisi geografis Kalimantan Timur yang luas serta belum meratanya infrastruktur transportasi menyebabkan proses distribusi barang menjadi kurang efisien. Hal ini mengakibatkan tingginya biaya logistik yang pada akhirnya meningkatkan harga barang di tingkat konsumen. Selain itu, gangguan distribusi akibat cuaca atau kondisi jalan juga dapat memperburuk ketidakstabilan harga.

3. Volatilitas harga komoditas pangan strategis

Komoditas seperti cabai, bawang merah, dan daging ayam ras memiliki karakteristik harga yang sangat fluktuatif. Perubahan kecil pada sisi pasokan maupun permintaan dapat menyebabkan lonjakan harga yang signifikan, sehingga menyulitkan upaya stabilisasi harga dalam jangka pendek.

4. Tingginya kontribusi komponen energi terhadap inflasi daerah

Kenaikan harga energi, khususnya tarif listrik dan potensi penyesuaian harga BBM, memberikan dampak langsung maupun tidak langsung terhadap inflasi. Dampak tidak langsung tersebut terjadi melalui peningkatan biaya distribusi dan produksi, yang kemudian mendorong kenaikan harga barang dan jasa lainnya.

5. Keterbatasan ruang fiskal daerah dalam melakukan intervensi pengendalian inflasi

Kebijakan efisiensi anggaran menyebabkan alokasi untuk kegiatan pengendalian inflasi menjadi lebih terbatas, sehingga intervensi yang dilakukan, seperti operasi pasar atau subsidi distribusi, belum dapat dilaksanakan secara optimal dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, permasalahan pengendalian inflasi di Kalimantan Timur menunjukkan bahwa tantangan utama tidak hanya terletak pada pengendalian harga di hilir, tetapi juga pada penguatan sisi hulu (produksi), distribusi, serta efektivitas kebijakan intervensi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih terintegrasi dan berbasis pada identifikasi permasalahan secara menyeluruh.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pelaksanaan strategi pengendalian inflasi melalui pendekatan **Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif (4K)** selama Triwulan III Tahun 2026 secara umum menunjukkan hasil yang cukup efektif dalam menjaga stabilitas harga di Provinsi Kalimantan Timur.

1. Keterjangkauan Harga

Dalam rangka menjaga keterjangkauan harga masyarakat, TPID Provinsi dan TPID Kabupaten/Kota secara intensif melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan operasi pasar, terutama untuk menyediakan komoditas pangan strategis dengan harga yang

terjangkau bagi masyarakat. Pelaksanaan GPM dilakukan pada berbagai wilayah dengan mempertimbangkan perkembangan harga dan kebutuhan masyarakat.

Selain itu, intervensi keterjangkauan harga juga dilakukan melalui pengiriman komoditas bahan pokok dan bahan penting (Bapokting) untuk mendukung kegiatan operasi pasar di wilayah yang mengalami tekanan pasokan maupun kenaikan harga.

2. Ketersediaan Pasokan

Pada Triwulan III Tahun 2026, kondisi El Nino yang berdampak pada kekeringan turut memberikan tantangan terhadap ketersediaan pasokan pangan. Kondisi tersebut juga berdampak pada terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta menurunnya ketersediaan air di sejumlah wilayah.

Sebagai langkah antisipasi terhadap potensi gangguan pasokan pangan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melakukan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, Bulog, distributor, dan pelaku usaha dalam menjaga ketersediaan komoditas pangan strategis.

Pada periode yang sama, Perum BULOG juga melaksanakan penyaluran bantuan pangan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagai bagian dari upaya menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat.

3. Kelancaran Distribusi

Kondisi El Nino pada Triwulan III Tahun 2026 tidak hanya berdampak terhadap sektor pangan, tetapi juga menimbulkan tantangan terhadap kelancaran distribusi. Kekeringan menyebabkan kondisi alur Sungai Mahakam mengalami penurunan, sehingga menyulitkan akses distribusi menuju Kabupaten Mahakam Ulu yang memiliki ketergantungan terhadap jalur transportasi sungai.

Dalam merespons kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melakukan perbaikan jalur jalan darat sebagai upaya mendukung kelancaran distribusi menuju wilayah Mahakam Ulu. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan distribusi kebutuhan pokok dan barang penting tetap dapat berlangsung meskipun terdapat kendala pada jalur sungai.

Selain itu, dilakukan pengiriman komoditas Bapokting untuk mendukung kegiatan operasi pasar, dengan melibatkan Kios SIGAP Mobile yang dikelola oleh PT Kaltim Melati Bhakti Satya (KT MBS). Keterlibatan Kios SIGAP Mobile menjadi salah satu upaya untuk mendekatkan pasokan komoditas kepada masyarakat, khususnya pada wilayah yang menghadapi keterbatasan akses distribusi.

Dalam rangka menjaga kelancaran distribusi energi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga melakukan koordinasi dengan PT Pertamina Patra Niaga dalam mendukung ketersediaan dan distribusi LPG bersubsidi maupun LPG nonsubsidi, sehingga kebutuhan energi masyarakat dan kegiatan ekonomi tetap dapat berjalan.

4. Komunikasi Efektif

Pengendalian inflasi selama Triwulan III Tahun 2026 juga dilakukan melalui penguatan koordinasi antara TPID Provinsi dan TPID Kabupaten/Kota serta perangkat daerah dan instansi terkait. Pemantauan perkembangan harga, pasokan, dan distribusi dilakukan secara berkelanjutan untuk mengidentifikasi potensi tekanan inflasi dan menentukan langkah intervensi yang diperlukan.

Gerakan Pangan Murah dilaksanakan secara intensif baik oleh TPID Provinsi maupun TPID Kabupaten/Kota sebagai bentuk intervensi langsung sekaligus komunikasi kepada masyarakat mengenai ketersediaan dan harga pangan. Pelaksanaan kegiatan tersebut juga menjadi sarana untuk menjaga ekspektasi masyarakat agar tetap stabil serta mencegah terjadinya kepanikan dalam memenuhi kebutuhan pangan.

Secara keseluruhan, kebijakan pengendalian inflasi pada Triwulan III Tahun 2026 tidak hanya diarahkan pada stabilisasi harga, tetapi juga pada pengamanan pasokan dan kelancaran distribusi, terutama dalam menghadapi dampak El Nino, kekeringan, karhutla, serta keterbatasan akses distribusi di wilayah tertentu. Langkah tersebut dilakukan melalui kombinasi intervensi pangan, penguatan distribusi, dukungan cadangan pangan, penyaluran bantuan pangan, serta koordinasi lintas sektor.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di Provinsi Kalimantan Timur pada Triwulan III Tahun 2026 secara umum mampu meredam tekanan inflasi jangka pendek, meskipun tekanan inflasi tahunan masih mengalami peningkatan. Kondisi tersebut tercermin dari perkembangan inflasi bulanan yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan akhir Triwulan II. Inflasi mtm pada Juni 2026 tercatat sebesar 0,70 persen, kemudian menurun menjadi 0,18 persen pada Juli, 0,10 persen pada Agustus, dan kembali sebesar 0,18 persen pada September 2026.

Dari sisi inflasi tahun kalender, inflasi ytd meningkat dari 2,36 persen pada Juni 2026 menjadi 2,82 persen pada September 2026. Dengan demikian, selama Triwulan III terjadi tambahan inflasi sebesar 0,46 percentage point. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa tekanan harga tetap terjadi, namun relatif dapat diredam melalui berbagai intervensi pengendalian inflasi yang dilakukan selama periode tersebut.

Efektivitas kebijakan terutama terlihat pada kemampuan pemerintah daerah dalam merespons gangguan pasokan dan distribusi yang terjadi selama Triwulan III. Kondisi El Nino yang semakin kuat memberikan tekanan terhadap produksi pangan dan meningkatkan risiko kekeringan. Tekanan tersebut turut tercermin pada September 2026, ketika kelompok makanan, minuman dan tembakau menjadi penyumbang terbesar inflasi tahunan dengan andil 1,53 persen.

Dalam menghadapi kondisi tersebut, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah, penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah, bantuan pangan BULOG, penyaluran SPHP, operasi pasar, pengiriman komoditas Bapokting, serta penguatan Kios SIGAP Mobile menjadi instrumen intervensi untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan. Di sisi distribusi,

perbaikan akses dan penguatan koordinasi distribusi BBM dan LPG turut dilakukan untuk menjaga kelancaran rantai pasok. Upaya tersebut sejalan dengan strategi 4K yang menjadi kerangka pengendalian inflasi TPID.

Namun demikian, kebijakan pengendalian inflasi masih menghadapi keterbatasan dalam mengatasi tekanan yang bersifat struktural dan eksternal. Inflasi yoy meningkat dari 3,20 persen pada Juni menjadi 3,98 persen pada September 2026. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh kelompok makanan, minuman dan tembakau, transportasi, serta perawatan pribadi dan jasa lainnya. Pada September, kelompok transportasi mengalami inflasi tahunan sebesar 9,41 persen dengan andil 1,21 persen, sementara kelompok makanan, minuman dan tembakau mengalami inflasi sebesar 5,09 persen dengan andil 1,53 persen.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa intervensi jangka pendek telah mampu menahan agar tekanan harga tidak meningkat secara lebih tajam, tetapi belum sepenuhnya mampu mengatasi sumber tekanan inflasi yang bersifat lebih mendasar, khususnya ketergantungan pasokan pangan dari luar daerah, biaya dan akses distribusi, serta dampak perubahan cuaca terhadap produksi pangan.

Dengan demikian, kebijakan pengendalian inflasi pada Triwulan III Tahun 2026 dapat dinilai cukup efektif dalam menjaga stabilitas harga dalam jangka pendek, namun belum optimal dalam menurunkan tekanan inflasi tahunan. Ke depan, kebijakan perlu diarahkan tidak hanya pada intervensi ketika harga telah meningkat, tetapi juga pada penguatan aspek hulu melalui peningkatan produksi pangan lokal, pengamanan pasokan dari daerah pemasok, penguatan cadangan pangan, peningkatan efisiensi distribusi, serta optimalisasi sistem peringatan dini untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim terhadap produksi dan pasokan pangan.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Berdasarkan perkembangan inflasi selama Triwulan III Tahun 2026, beberapa langkah strategis yang perlu menjadi perhatian TPID Provinsi Kalimantan Timur antara lain:

1. Memperkuat mitigasi risiko El Nino

TPID perlu menjadikan El Nino sebagai salah satu indikator utama dalam sistem peringatan dini inflasi, terutama untuk memantau risiko produksi dan pasokan pangan.

Pemantauan perlu mengintegrasikan informasi cuaca BMKG dengan data harga, stok dan produksi sehingga dapat diketahui komoditas serta wilayah yang berpotensi mengalami gangguan pasokan.

Pemerintah daerah perlu memastikan ketersediaan komoditas pangan strategis sebelum memasuki periode risiko yang lebih tinggi.

Langkah dapat dilakukan melalui:

- penguatan stok pangan;
- pemetaan daerah pemasok;
- penguatan KAD;
- koordinasi dengan Bulog dan distributor;
- penguatan produksi pangan lokal;

optimalisasi cadangan pangan pemerintah.

2. Memperluas Kerja Sama Antar Daerah

KAD perlu diperkuat terutama untuk komoditas:

- cabai rawit;
- cabai merah;
- bawang merah;
- beras;
- daging ayam ras;
- telur ayam ras;
- sayuran strategis.

Kerja sama perlu diarahkan tidak hanya pada transaksi perdagangan, tetapi juga pada jaminan volume, jadwal pasokan dan kontinuitas distribusi.

3. Mengoptimalkan EWS dan MANDAU KALTIM

Pemanfaatan EWS dan MANDAU KALTIM perlu diarahkan sebagai instrumen pengambilan keputusan.

Data harga sebaiknya diintegrasikan dengan:

- stok;
- produksi;
- kondisi cuaca;
- distribusi;
- kebutuhan konsumsi;
- perkembangan harga daerah pemasok.

Dengan demikian, sistem dapat digunakan untuk memberikan rekomendasi kapan perlu dilakukan intervensi, komoditas apa yang perlu diamankan dan wilayah mana yang perlu menjadi prioritas.

4. Memperkuat intervensi pangan menjelang Natal dan Tahun Baru

Gerakan Pangan Murah, operasi pasar dan pemanfaatan kios penyeimbang perlu dipersiapkan lebih awal, terutama pada komoditas yang memiliki risiko kenaikan harga.

Intervensi sebaiknya dilakukan secara targeted, berdasarkan data perkembangan harga dan risiko pasokan, sehingga anggaran yang terbatas dapat digunakan secara lebih efektif.

5. Mengantisipasi peningkatan mobilitas masyarakat

Koordinasi dengan operator transportasi, Pertamina, instansi perhubungan dan pelaku usaha perlu diperkuat menjelang Natal dan Tahun Baru.

Pemantauan perlu mencakup:

- ketersediaan angkutan;
- tarif angkutan;
-

tiket angkutan udara;
- ketersediaan BBM;
- distribusi BBM;
- biaya angkutan barang.

6. Memperkuat pengawasan distribusi BBM dan LPG

Pengawasan distribusi BBM dan LPG perlu terus dilakukan untuk memastikan tidak terjadi gangguan pasokan yang dapat meningkatkan biaya distribusi maupun biaya hidup masyarakat.

7. Mendorong peningkatan produksi pangan lokal

Dalam jangka menengah dan panjang, ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah perlu dikurangi melalui pengembangan kawasan produksi pangan dan hortikultura, urban farming, optimalisasi lahan serta penguatan rantai pasok pangan lokal.

8. Memperkuat pemantauan inflasi secara spasial

Perbedaan inflasi antarwilayah menunjukkan perlunya strategi yang lebih spesifik berdasarkan karakteristik daerah. Wilayah perkotaan dapat difokuskan pada pengendalian transportasi dan jasa, sementara wilayah dengan keterbatasan akses difokuskan pada ketersediaan stok dan kelancaran distribusi.

9. Memperkuat komunikasi publik

TPID perlu menyampaikan informasi harga dan kebijakan pengendalian inflasi secara cepat, sederhana dan konsisten. Komunikasi publik terutama diperlukan ketika terdapat risiko kenaikan harga akibat cuaca, gangguan pasokan maupun peningkatan permintaan agar tidak terjadi kepanikan atau pembelian berlebihan.

-